

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kebijakan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, menyebabkan adanya pelimpahan wewenang dalam komposisi pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip *good corporate governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah unit organisasi di tingkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan pada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu indikator pelaksanaan tata Kelola pada tingkat OPD dapat dilihat dari Laporan keuangan OPD dimana memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan OPD juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk pengusaha, investor, dan warga negara pada umumnya. Semakin baik penyajian laporan keuangan akan berdampak terhadap peningkatan akuntabilitas publik, dalam hal ini pengguna informasi dalam laporan keuangan akan memperoleh informasi yang berkualitas (Purba *et al.*, 2021). Dengan mudahnya akses terhadap informasi keuangan OPD, maka masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan melakukan kontrol sosial terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Hal ini diharapkan dapat membantu mendorong transparansi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan merujuk pada kemampuan individu atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh dan memahami informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah

dokumen yang berisi informasi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi, yang disajikan dalam bentuk tertentu, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan sejalan dengan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berisi memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi public untuk mendapatkan informasi public, kecuali beberapa informasi tertentu. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, meliputi: 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, 3. Laporan arus kas, dan 4. Catatan atas laporan keuangan (Indonesia, 2010).

Pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah meliputi proses perencanaan anggaran, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan audit. Sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel sangat penting dalam konteks sektor publik, terutama pada Organisasi Perangkat Daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah menjadi aspek yang krusial untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Kota Probolinggo dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dua faktor penting perlu diperhatikan, yaitu aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal. Aksesibilitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada ketersediaan dan kemudaghan akses terhadap informasi keuangan yang relevan, termasuk laporan keuangan, neraca, dan catatan-catatan lainnya. Sementara itu, sistem pengendalian internal mencakup prosedur dan mekanisme yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan dan mengendalikan aktivitas keuangan di Organisasi Perangkat Daerah.

Namun, meskipun pentingnya aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah, masih perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami pengaruh keduanya secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara keduanya, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini mencakup pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui survei atau wawancara dengan pihak terkait di Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Probolinggo terpilih. Data sekunder akan diperoleh dari studi literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait, jurnal akademik, dan publikasi pemerintah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dalam meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, sehingga tercapai pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Untuk mengetahui Apakah Sistem Pengendalian Internal yang telah dilaksanakan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pada Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun beberapa manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai salah satu pertimbangan dalam meningkatkan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal kepada Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

2. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya :

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai literatur untuk meneliti topik Aksesibilitas tentang Laporan Keuangan Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

